

**HIMPUNAN PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2015-2016**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM**

TAHUN 2018

**HIMPUNAN PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2015-2016**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

I	Kata Pengantar		ii
II	Daftar Isi		iii
1.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015	Program Nasional Agraria	1
2.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015	Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal	10
3.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2015	Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN Terhadap Pihak Tertentu	39
4.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015	Program Nasional Agraria (Prona)	48

- | | | | |
|----|---|---|-----|
| 5. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 | Izin Lokasi | 57 |
| 6. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 | Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah | 86 |
| 7. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2015 | Pedoman Pelaksanaan Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 93 |
| 8. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 | Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 123 |
| 9. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan | Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas | |

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015	Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu	431
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	445
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2015	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasional	468



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT